

**PARTISIPASI PEMUDA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
HASIL MUSRENBANG DI DESA ARASOE KECAMATAN
CINA KABUPATEN BONE**

*YOUTH PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF
MUSRENBANG PROGRAMS IN ARASOE VILLAGE
CINA DISTRICT BONE REGENCY*

RISNAWATI

P022181025



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



**PARTISIPASI PEMUDA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
HASIL MUSRENBANG DI DESA ARASOE KECAMATAN
CINA KABUPATEN BONE**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

RISNAWATI

Kepada

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

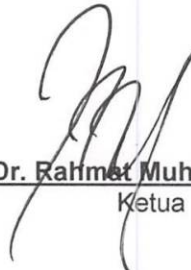
**PARTISIPASI PEMUDA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM HASIL
MUSRENBANG DI DESA ARASOE KECAMATAN CINA
KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh

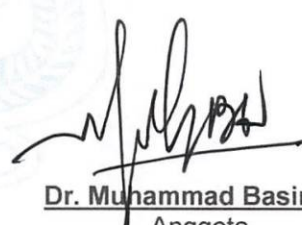
RISNAWATI
Nomor Pokok P022181025telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 25 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,


Dr. Rahmat Muhammad, M.Si

Ketua

Ketua Program Studi
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng
Dr. Muhammad Basir, MA

Anggota

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Ismail Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RISNAWATI

Nomor mahasiswa : P022181025

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan



RISNAWATI



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas segala nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta shalawat dan salam yang tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis meyakini sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dengan penuh hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M. A. Selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M. Sc. Selaku dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M. Eng. Selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Rahmat Muhammad, M.Si dan Dr. Muhammad Basir, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, tenaga dan pikirannya dalam memberikan saran dan kritik perbaikan dengan penuh rasa tanggung jawab serta



senantiasa memberikan motivasi dan nasehat sejak awal hingga penyelesaian tesis ini.

5. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng, Dr. Hasbi, M.Si, dan Dr. Munsil Lampe, MA, selaku penguji yang telah banyak memberikan kritik, masukan dan saran yang sangat konstruktif serta kontribusi lainnya untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan pengampuh mata kuliah dari berbagai program studi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan.
7. Kementrian Pemuda dan Olahraga selaku pemberi Beasiswa Program Pascasarjana sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang program magister di Universitas Hasanuddin.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Nasir dan ibunda Camonro yang telah begitu banyak mencurahkan kasih sayang, doa serta harapan kepada anaknya sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
9. Pemerintah Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian yang senantiasa memberi dukungan dan informasi kepada peneliti.
10. Sahabat-sahabat PMII BONE yang senantiasa memberikan



motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

11. Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin khususnya Penerima Beasiswa Kemenpora tahun 2018 yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Makassar, 27 Agustus 2020

Penulis,

RISNAWATI



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Konsep	11
1. Konsep Partisipasi	11
2. Konsep Pemuda	23
3. Konsep Partisipasi Pemuda	27
4. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa	28
Musrenbang Desa	31
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ..	32
Tinjauan Empiris (Hasil Penelitian Terdahulu)	35



C. Kerangka Konsep.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	38
1. Lokasi Penelitian.....	38
2. Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Instrumen Penelitian	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Definisi Operasional	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Hasil dan Pembahasan	67
1. Faktor yang melatar belakangi pemuda berpartisipasi dalam implementasi program hasil musrenbang desa di Desa Arasoe.....	68
2. Bentuk partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang desa di Desa Arasoe	77
3. Dampak Partisipasi Pemuda dalam Implementasi Program Hasil Musrenbang Desa di Desa Arasoe.....	93
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR RUJUKAN.....	102



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinjauan empiris hasil penelitian terdahulu	35
Tabel 2. Identitas Informan	42
Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin	53
Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/ Mata Pencaharian .	53
Tabel 5. Sarana Pendidikan di Desa Arasoe	55
Tabel 6. Sarana Kesehatan di Desa Arasoe	56
Tabel 7. Pengelola Sarana dan Prasarana di Desa Arasoe.....	56
Tabel 8. Luas Wilayah Desa Arasoe Menurut Penggunaannya.....	57
Tabel 9. Potensi, Komoditas dan Pemasarannya	58
Tabel 10. Aparat Pemerintah Desa Arasoe.....	61
Tabel 11. Strategi Pembangunan	62
Tabel 12. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein	15
Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian	37
Gambar 3. Peta Kecamatan Cina	39
Gambar 4. Struktur Pemerintahan Desa Arasoe Kecamatan Cina.	60
Gambar 5. Peta Desa Arasoe	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone	105
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Desa Tahun 2019.....	107
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Dan FGD	113
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	117
Lampiran 5. Tabel matrix informasi.....	122
Lampiran 6. Tabel Hasil Kegiatan Observasi	123
Lampiran 7. Hasil Kegiatan Dokumentasi	124
Lampiran 8. Reduksi Hasil Wawancara	125



DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang/singkatan	Arti dan Keterangan
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RPJMDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDes	Rencana Kerja Pembangunan Desa
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Musrenbang	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PP	Peraturan Pemerintah
UU	Undang-Undang
No	Nomor
Ket	Keterangan
SSE	Status Sosial Ekonomi
KADES	Kepala Desa
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
FGD	Focus Group Discussion
E-book	Electronic book



KK	Kartu Keluarga
Komp. PGB	Kompleks Pabrik Gula Bone
TK	Taman Kanak-Kanak
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
Polindes	Pondok Bersalin Desa
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PHBI	Perayaan Hari Besar Islam



ABSTRAK

RISNAWATI. *Partisipasi Pemuda dalam Implementasi Program Hasil Musrenbang di Desa Arasoe Kecamatan Cina, Kabupaten Bone* (dibimbing oleh Rahmat Muhammad dan Muhammad Basir).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan (1) faktor yang melatar-belakangi pemuda berpartisipasi dalam implementasi program hasil musrenbang di Desa Arasoe; (2) bentuk partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil murenbang di Desa Arasoe; dan (3) dampak partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang di Desa Arasoe.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Arasoe Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Subjek penelitian terdiri atas kepala desa, perangkat desa, dan kelompok pemuda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, kajian kepustakaan, dan foto (dokumentasi). Peneliti merupakan instrument utama. Tahapan analisis data adalah pengumpulan data, pereduksian data, penyajian data, dan penyimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi pemuda berpartisipasi, yakni status sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. (2) Terdapat tiga bentuk partisipasi pemuda, yakni partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan partisipasi dalam tahap pemantauan dan pengevaluasian. (3) Dampak partisipasi pemuda di bidang sosial, yakni sarana dan prasarana yang memadai; di bidang ekonomi, yakni peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan bercocok tanam; dan di bidang politik, yakni kesadaran masyarakat akan pentingnya kerja sama.

Kata kunci: partisipasi, pemuda, musrenbang desa



ABSTRACT

RISNAWATI. *Youth Participation in The Implementation of Musrenbang Programs in Arasoe Village, China Disctrict, Bone Regency* (Supervised by **Rahmat Muhammad** and **Muhammad Basir**)

This study discusses 1) the factors underlying the negotiations in the implementation of the Musrenbang program in Arasoe Village; 2) the form of youth participation in the implementation of the Musrenbang program in Arasoe Village; and 3) the plan for increasing youth participation in the implementation of Musrenbang program in Arasoe Village.

The research was conducted in Arasoe Village, China District, Bone Regency. The method used was descriptive qualitative. The subjects of the study were village head, village officials, and youth groups. Data collection was done using methods of observation, interviews, literature studies, and photographs. Researchers were the main instrument in conducting research. Techniques used in data analysis were data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.

The results obtained in this study are: First, there are factors behind youth participation, namely socioeconomic status factors, socio-cultural factors, and environmental factors. Second, there are three forms of youth participation, namely participation in the planning stage, participation in the implementation phase, and involvement in the monitoring and evaluation phases. Third, the impact of youth participation in the social sector, namely adequate facilities and infrastructure, in the industrial area, namely improving the economy of rural communities by planting crops, in the political field, namely public awareness of importance of cooperation.

Keywords: Participation, Youth, Village Development Planning Discussion



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintahan daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.

Dengan demikian, diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan intuisi atau perasaan emosional akan tetapi juga bisa dipertanggung jawabkan hasilnya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki



batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan hak asal-usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan secara nasional dan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari keberadaan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan (Yustika, 2015).

Maka dari itu, Desa memiliki kewenangan penuh untuk mengurus peraturan-peraturan dan tata tertib yang diberlakukan disetiap desa, guna untuk mengembangkan potensi disetiap desa serta memberdayakan masyarakat desa.

Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada desa yaitu: kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah en/ Kota; dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,



pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (UU No.6 Tahun 2016 tentang Desa).

Selain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga diberikan kewenangan lain oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota, sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (UU No.6 Tahun 2016 Tentang Desa).

Maka dari kewenangan yang diberikan tersebut, desa harus mengelola pemerintahannya dengan baik, begitu pula dengan membina dan memberdayakan masyarakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Setiap pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, begitu juga dengan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 79 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan desa harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan pusat. Sedangkan perencanaan pembangunan dari tingkat bawah berguna sebagai masukan kepada pemerintah di atasnya (Susetiawan et al, 2018).



Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan pembangunan ditingkat pusat, daerah dan desa. Dengan demikian

pembangunan yang dilaksanakan terarah dari tingkat bawah sampai ditingkat atas, sehingga dengan begitu tidak ada pembangunan yang mubassir atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Setiap perencanaan pembangunan disusun melalui forum musyawarah, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut Musrenbang, ditingkat desa disebut dengan Musrenbang Desa. Musrenbang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKP Desa dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) (Sulaiman et al, 2015). Hal tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, pasal 80 menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APBD Desa, swadaya

kat dan juga bersumber dari APBD. Perencanaan pembangunan



desa yang dimaksud dalam pasal ini mewajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya (Fadil, 2013).

Oleh karena itu keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sangat penting, mengingat hal tersebut dapat menunjang keberhasilan program desa.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 116 ayat 1 dan 2 menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa termuat RPJM Desa dan RKP Desa. Pemerintah desa wajib dan harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat (Indrianasari, 2017). Seluruh elemen masyarakat yang dimaksud disini adalah tokoh masyarakat, kelompok tani, LSM, pemuda dan lain sebagainya. Sesuai dengan UU Nomor 6

014 tentang Desa dan PP Nomor 43/2014 tentang Pelaksanaan



UU Desa, salah satu elemen masyarakat yang dibutuhkan keterlibatannya yaitu Pemuda.

Pemuda Desa Arasoe Kabupaten Bone memiliki peran penting dalam berbagai sektor perihal perencanaan program, pelaksanaan program sampai pada pengawasan pelaksanaan program Desa Arasoe.

Hal itu tidak terlepas dari peran kepala desa yang menempatkan pemuda Desa Arasoe sebagai sumber daya yang patut diberi ruang dalam proses menciptakan Desa Arasoe sebagai Desa yang *Maju Sehat Sejahtera dan Berkarakter* (RPJM Desa Arasoe, 2016-2021).

Proses dinamisasi dan peningkatan kreativitas juga terjadi disebagian kalangan pemuda. Mereka mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dalam proses pembangunan dan mampu membawa diri dalam peri kehidupan modern yang lebih rasional, menghargai waktu, bekerja efisien, membuat perencanaan dan melihat jauh ke depan (Kusumo & Puspitasari, 2017). Kreativitas dalam proses pembangunan dan pemberdayaan yang aktif dilakukan oleh pemuda di Desa ini mampu menjadi cerminan bagi pemuda-pemuda yang ada di Desa lainnya, khususnya dibidang pengembangan seni dan olahraga yang beberapa kali mendapatkan juara dari setiap event pertandingan.

Tidak hanya itu, namun dari keterlibatan dan campur tangan pemuda, mampu mengantarkan Desa Arasoe sebagai Desa terbaik di

tan Cina, dengan mendapatkan penghargaan sebagai Desa pada tahun 2018.



Dari sisi lain keberhasilan tersebut hanya sebagian pemuda yang ikut dilibatkan di dalam tahap perencanaan kegiatan yaitu hanya dari golongan pemuda yang memiliki jenjang pendidikan tinggi, seperti Sarjana. Sedangkan pemuda yang pendidikannya rendah atau setara SMA/MA hanya dilibatkan sebagai pekerja atau terlibat di dalam tahap pelaksanaan kegiatan saja. Seharusnya semua kalangan pemuda, baik itu yang memiliki pendidikan tinggi atau rendah harus diikutsertakan mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Karena tidak menutup kemungkinan pemuda yang berpendidikan rendah juga memiliki sebuah ide atau perencanaan yang menarik, yang bisa memberikan perubahan lebih baik untuk Desa Arasoe.

Berdasarkan data dan informasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui lebih lanjut tentang **Partisipasi Pemuda Dalam Implementasi Program Hasil Musrenbang Di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone.**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang melatar belakangi pemuda berpartisipasi dalam implementasi program hasil musrenbang desa di Desa Arasoe?
2. Bagaimana bentuk partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang desa di Desa Arasoe?
3. Sejauh mana dampak partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang desa di Desa Arasoe?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor yang melatar belakangi pemuda berpartisipasi dalam implementasi program hasil musrenbang desa di Desa Arasoe.
2. Untuk menganalisis bentuk partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang desa di Desa Arasoe.
3. Untuk menganalisis sejauh mana dampak partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang desa di Desa Arasoe.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dimasa yang akan datang dalam menerapkan ilmu mengenai partisipasi pemuda dalam musrenbang desa.
2. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak lain terutama Pemerintah dalam menyikapi



program yang diberikan dalam pengembangan dan pembangunan desa.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai proses partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang desa dengan objek penelitian di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Upaya ini sesuai dengan UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan dan pembinaan masyarakat desa. Mengenai partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang desa, penulis membatasi pada faktor yang melatar belakangi partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang desa. Kemudian bentuk partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil musrenbang desa. Dan bentuk pengawasan pemuda terhadap implementasi program hasil musrenbang di Desa Arasoe.

2. Ruang Ligkup Wilayah

Lingkup wilayah pada penelitian ini berada di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang terdiri dari Enam Dusun, yakni: Dusun Arasoe, Dusun Kompleks PGB,



DusunLacuco, Dusun Kompleks Pasar, Dusun Ujung, Dusun
Bance Tajjurue.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian untuk membahas masalah penelitian sekaligus menjadi landasan teori dan konsep dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai konsep pemuda, partisipasi, musrenbang desa.

A. Tinjauan Konsep

1. Konsep Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Definisi lain menyebutkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan



evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan (Wibisono, 1989:41).

Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya. Partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi (Solihah et al, 2018).

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara tidak langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan

aksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa



sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan (Wibisono, 1989:41).

Merujuk dari pendapat tersebut dalam penelitian ini partisipasi pemuda juga terbagi atas dua macam yaitu partisipasi langsung yakni dengan bantuan tenaga dan partisipasi tidak langsung dengan bantuan pemikiran atau pendanaan.

Partisipasi masyarakat merupakan lingkungan yang di dalamnya terdapat interaksi individu dengan individu yang lain (Walgito, 1999:41). Dimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, hal tersebut dapat dibedakan antara lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Dimana dalam partisipasi di lingkungan sosial primer terdapat hubungan yang erat antara individu satu dengan individu yang lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Walgito, partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat antara individu satu dengan individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan tidak dapat berhasil.

Partisipasi adalah keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan. Dalam konteks pembangunan, partisipasi kat berarti keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, i tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap



pembangunan itu sendiri. Meskipun tidak benar-benar sangat menentukan kebijakan yang dihasilkan namun partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena dengan partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta diorientasikan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat itu sendiri.

b. Tingkat Partisipasi

Arnstein dalam Dwi (2015:29-32) memberikan delapan model tangga partisipasi masyarakat yang digunakan untuk mengukur kadar partisipasi masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *ladder of participation* (tangga partisipasi). Menurutnya, terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian dikerucutkan lagi dan diperinci dalam delapan anak tangga partisipasi sebagai berikut.

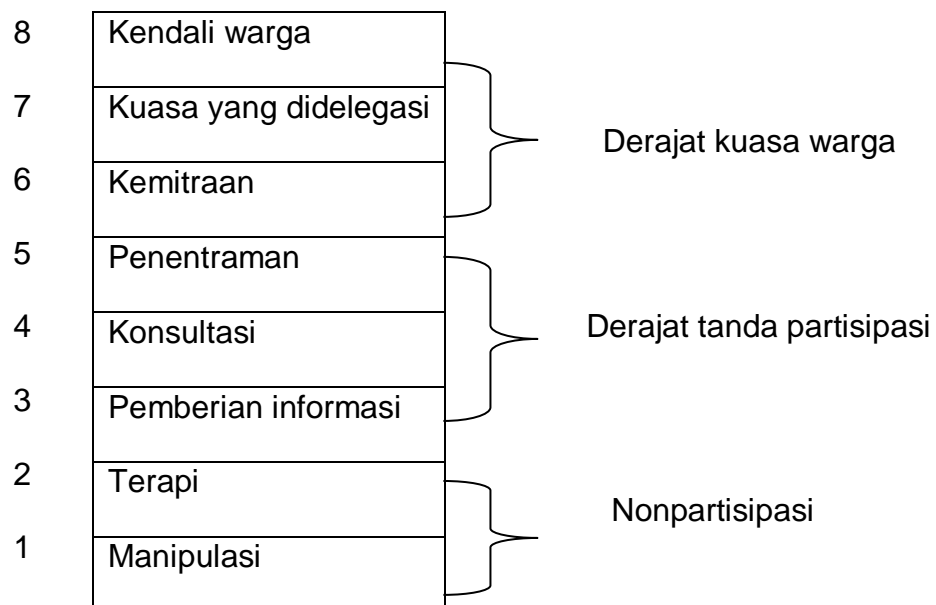
- 1) Derajat pertama dan paling rendah adalah nonpartisipasi. Aktivitas pada tahap ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi, tujuan sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan, dan di dalam derajat ini terdapat dua anak tangga yaitu manipulasi dan terapi.
- 2) Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan adanya partisipasi (*tokenism*). Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan derajat sebelumnya. Praktik partisipasi dalam pemerintahan daerah paling banyak terjadi pada



derajat yang meliputi tiga anak tangga ini, yakni pemberian informasi, konsultasi, dan penentruman (*placation*).

- 3) Derajat ketiga adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung baik pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini menunjukkan adanya retribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertinggi yakni kendali warga. Berikut ini model tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein.

Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein



1. Manipulasi



tingkat partisipasi terendah yang memposisikan masyarakat hanya sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai

badan penasihat. Tujuan sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan. Dal hal ini tidak ada partisipasi yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. Terapi

Dalam tingkatan ini, para ahli memperlakukan masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan namun pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

3. Pemberian informasi

Pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat ini terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan,

masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memengaruhi rencana.



4. Konsultasi

Dalam tingkat ini pemegang kuasa telah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengundang opini mereka. Masyarakat juga telah dilibatkan dalam dialog dua arah dengan pemegang kuasa namun masih tidak ada jaminan bahwa ide maupun gagasan yang disampaikan oleh masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, temu warga, dan dengar pendapat masyarakat.

5. Penentraman

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. Kemitraan

Pada tingkat ini atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk



saling membagi tanggungjawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7. Kuasa yang didelegasi

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang ada, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Pada tahap ini masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. Kendali warga

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuat sendiri.



c. Bentuk Partisipasi

Menurut Slamet (1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas tiga tahap, yaitu:

1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

2) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

3) Partisipasi di dalam tahap pemantauan & evaluasi (monitoring & evaluasi).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemantauan, pengawasan terhadap suatu proyek yang sedang berjalan. Tujuan dari pemantauan adalah mengamati serta mengetahui perkembangan dan kemajuan suatu program. Sedangkan evaluasi merupakan proses menentukan nilai-nilai penting suatu program. Partisipasi masyarakat pada tahap



ini dapat berupa pengawasan dan penilaian terhadap suatu program berjalan.

Dari uraian konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi pemuda terhadap Implementasi Hasil Musrenbang Desa adalah partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi.

d. Faktor Pengaruh dalam Partisipasi

Damsar (2011:235) telah menelusuri berbagai kajian tentang partisipasi dari berbagai para ahli. Dari kajian tersebut, Damsar telah merumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi orang dalam berpartisipasi, yakni sebagai berikut:

1) Faktor Status Sosial Ekonomi (SSE)

- Pendidikan

Pendidikan yang dimiliki seseorang dipandang bisa memengaruhi partisipasi seseorang dalam berbagai kegiatan publik. Hal itu dapat dimengerti karena pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk memahami, mengerti, menganalisis, memberikan solusi terhadap berbagai realitas kehidupan, termasuk partisipasi dalam berbagai kegiatan publik.



- Pekerjaan

Pekerjaan seseorang memberikan suatu ruang dan waktu tertentu bagi orang tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan publik. Pekerjaan tertentu membatasi seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, misalnya pelaut, sedangkan pekerjaan lain memberikan kesempatan besar bagi seseorang berpartisipasi dalam kegiatan publik, misalnya Guru. Jadi, kepemilikan ruang dan waktu dalam berpartisipasi pada kegiatan publik berbeda karena perbedaan pekerjaan.

- Pendapatan

Pendapatan diperoleh karena seseorang melakukan pekerjaan. Pendapatan biasanya dipandang sebagai premium dalam keikutsertaan pada kegiatan publik. Dengan kecukupan pendapatan, seseorang tidak perlu berjuang mengatasi persoalan antara melakukan pekerjaan atau meninggalkannya untuk sementara waktu untuk ikut serta pada kegiatan publik.

- Kekayaan

Tingkat kekayaan dapat memperlancar atau menghambat seseorang dalam melakukan partisipasi. Secara umum, semakin tinggi pendapatan seseorang semakin mudah



orang tersebut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik.

2) Faktor Sosial Budaya

- Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam partisipasi masyarakat bisa mendorong dan juga sebaliknya menghambatnya. Jika demikian maka gaya kepemimpinan cenderung berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

- Stratifikasi Sosial

Ketaatan orang terhadap ajakan berpartisipasi berkaitan dengan posisinya dalam stratifikasi sosial, yang berpangkal pada otoritas yang mampu diolahnya dalam kehidupan keseharian sehingga ia dipatuhi oleh orang lain.

- Adat Istiadat

Setiap masyarakat memiliki adat istiadat sendiri, berbeda dengan yang dimiliki oleh masyarakat lain. Adat istiadat merupakan suatu elemen kebudayaan. Adat istiadat bisa menjadi faktor penghambat atau sebaliknya faktor pelancar bagi suatu partisipasi.

3) Faktor Lingkungan

- Keterisolasian Daerah

Keterisolasian daerah dapat dilihat sebagai koin yang berisi dua dalam partisipasi. Sisi pertamanya adalah keterisolasian



daerah dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan partisipasi. Dalam kondisi seperti ini, misalnya suatu komunitas tersebar berjarak karena bukit, sungai, lembah atau ngarai, anggota masyarakat terhambat keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan dan program yang dilakukan.

- Cuaca

Cuaca, seperti juga keterisolasian daerah, dapat merupakan sebagai faktor penghambat maupun sebagai faktor pelancar bagi partisipasi dari anggota masyarakat. Ketika cuaca cerah pada suatu komunitas maka cenderung partisipasi anggota masyarakat relatif tinggi. Sebaliknya, jika cuaca buruk pada suatu komunitas, maka cenderung partisipasi anggota masyarakat relatif rendah.

Dari uraian konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda terhadap Implementasi Hasil Musrenbang Desa yakni faktor status sosial ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan.

2. Konsep Pemuda

Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak bergantung pada kaum mudanya sebagai *agent of change* (agenan). Pemuda sebagai aset bangsa adalah hal yang tidak dapat



kita pungkiri, sehingga tidak salah kemudian pemuda memiliki posisi strategis diberbagai bidang kehidupan sekaligus menjadi indikator maju mundurnya suatu bangsa. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang handal. Pemuda adalah kaum muda yang harus dilihat sebagai “pribadi” yang sedang berada pada taraf tertentu dalam perkembangan hidup seorang manusia, dengan kualitas dan ciri tertentu yang khas, dengan hak dan peranan serta kewajiban tertentu dengan potensi dan kebutuhan tertentu pula (Chandra, 2011:1).

Dalam proses pembangunan negara, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Menurut Mulyana (2011:1) mengemukakan bahwa Pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, anti kemapanan, serta ada tujuan lebih membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemuda. Acuan yang kedua inilah yang pada

lu digunakan, sehingga pada saat itu terlihat bahwa organisasi



pemuda itu lebih banyak dikendalikan oleh orang-orang yang secara usia sudah tidak muda lagi, tetapi mereka mempunyai jiwa pemuda.

Oleh sebab itu kelemahan dari pemikiran yang kedua itu organisasi kepemudaan yang seharusnya digunakan sebagai wadah untuk berkreasi dan mematangkan para pemuda dijadikan kendaraan politik, ekonomi, dan sosial untuk kepentingan perorangan dan kelompok. Secara hukum Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009).

Sesuai dengan dasar hukum tersebut maka yang dimaksud pemuda dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Selain itu, pengertian pemuda dapat dilihat dari dua segi yaitu biologis dan ideologis. Pemuda secara biologis adalah manusia yang berada pada masa pertumbuhan dan batasan umur tertentu. Sedangkan pemuda secara ideologis adalah manusia yang mempunyai pikiran, semangat dan jiwa muda. Sesuai dengan Undang-undang tentang Kepemudaan maka peneliti mendefinisikan pemuda dari segi usia. Dengan begitu, semua warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 16 sampai 30 tahun dapat dikatakan sebagai pemuda.

Lebih lanjut Mulyana (2011:1) mengemukakan bahwa selain didasarkan pada usia pemuda juga dapat dilihat dari sifat/jiwa yang



inginnya. Jika didasarkan pada sifat maka pemuda mempunyai ciri-ciri. Selalu ingin memberontak terhadap kemapanan. Hal ini lebih

disebabkan karena pada usia ini seorang pemuda sedang mencari identitas diri. Keinginan untuk diakui dan ingin mendapatkan perhatian mendorong pemuda untuk berbuat sesuatu yang "tidak biasa-biasa saja dan sama dengan yang lain". Ditinjau dari sisi positif perilaku ini akan memunculkan kreatifitas, akan tetapi disisi lain akan muncul penentangan dari pihak lain khususnya pihak orang dewasa yang sudah mapan.

Bekerja keras dan pantang menyerah, Sifat kedua ini berhubungan erat dengan sifat pertama. Kerja keras dan pantang menyerah inilah yang mendorong pemuda berlaku revolusioner. Perilaku revolusioner inilah yang memunculkan anggapan bahwa pemuda itu tidak berpikir panjang sehingga akan berpotensi untuk menimbulkan konflik baik itu dengan sesama pemuda maupun dengan orang tua. Selalu optimis, Sifat ini sangat menunjang sifat kerja keras dan pantang menyerah. Sifat optimis ini akan mendorong pemuda selalu bersemangat berusaha untuk mencapai cita-citanya.

Berdasarkan tinjauan tersebut, mendefinisikan pemuda itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pemuda tidak hanya dilihat dari sisi usia, akan tetapi pemuda juga harus ditunjang oleh sifat/jiwa yang berbeda dengan golongan usia lainnya. Seseorang yang berusia muda belum tentu dapat dikatakan pemuda jika sifat/jiwanya tidak mencerminkan seorang pemuda. Demikian juga sebaliknya seseorang

dah tidak masuk kategori muda secara usia belum tentu tidak layak sifat/jiwa seperti pemuda pada umumnya.



3. Konsep Partisipasi Pemuda

Partisipasi pemuda sangat penting dalam suatu masyarakat, khususnya dalam pembangunan bangsa mengingat pemuda merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya. Berhasil tidaknya suatu proses pembangunan suatu bangsa tergantung pada tingkat partisipasi pemuda yang ada pada suatu negara tersebut. Dalam era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan kompetisi merupakan suatu hal yang lumrah terjadi, pemuda dituntut untuk aktif, peduli, inovatif, dan bersemangat dalam upaya untuk meneruskan cita-cita pembangunan suatu bangsa dan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pasal 16 menyebutkan bahwa salah satu peran pemuda adalah sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Artinya pemuda adalah seorang/kelompok yang diharapkan mampu membawa perubahan dan harus terlibat dalam proses pembangunan.

Hal di atas menjelaskan bahwa partisipasi pemuda merupakan keterlibatan pemuda dalam suatu kegiatan, baik keterlibatannya melalui tenaga, pikiran dan biaya. Jika dilihat dari konteks pembangunan desa maka yang dimaksud dengan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa adalah keterlibatan pemuda baik secara fisik maupun non fisik



bersama-sama dengan aktor yang lain dalam usaha membangun dari segi kesempatan sebenarnya kesempatan kerja bagi pemuda banyak jika dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya karena

pemuda adalah manusia yang mempunyai tenaga, penuh cita-cita dan dinamika.

Menurut Siagian dalam Dwi(2015:35), pemuda sebagai generasi penerus bagi pembangunan desa, mereka perlu diikutsertakan dalam memikirkan, merencanakan dan memutuskan apa yang hendak dibangun oleh desa. Karena itu dalam setiap pertemuan atau rembuk desa yang diadakan, unsur pemuda perlu diikutsertakan dan sebaiknya pendapat dan saran mereka diminta serta diperhatikan. Hal tersebut menjelaskan bahwa partisipasi pemuda sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan desa karena mereka adalah generasi penerus yang nantinya akan memimpin dimasa depan.

Dengan melibatkan pemuda maka akan muncul “Sense of belonging” yaitu perasaan ikut memiliki pembangunan desa. Pada akhirnya, partisipasi pemuda diharapkan mampu memberikan “warna yang berbeda” dan “angin segar” dalam perencanaan pembangunan desa.

4. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan menurut UU No.25 tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan salah satu unsur dalam perumusan/formulasi kebijakan, pada tahap ini dilakukan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh



pembuat kebijakan yang mempertimbangkan besarnya pengaruh langsung yang dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut.

Tjokroamidjojo dalam Arrumi (2014:38) mengemukakan bahwa, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan memberikan alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara manusiawi. Siagian (2009: 4-5) menjabarkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Sementara Soedjatmoko (1983:76) mendefinisikan pembangunan sebagai penggerak sistem sosial yang sejauh ini mandeg, untuk mengejar tujuan-tujuan baru, makin menandakan betapa pentingnya motivasi, dan makna dalam proses pembaharuan diri nasional.



Dalam merencanakan pembangunan, maka *stakeholder* utama adalah masyarakat karena masyarakat adalah sasaran utama pembangunan itu sendiri, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Maka pembangunan diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat karena sejatinya masyarakatlah yang paling mengetahui tentang permasalahan yang mereka hadapi. Maka dari itu untuk menetapkan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dimana, berapa, siapa yang melaksanakan dan menjadi sasaran pembangunan maka dalam perencanaan wajib hukumnya melibatkan masyarakat.

Tjokroamidjojo dalam Arrumi (2014:39) Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat desa secara gotong royong dan kekeluargaan dengan menumbuhkan semangat swadaya untuk melakukan perubahan demi terciptanya masyarakat desa yang lebih sejahtera dan berkualitas.

Jadi dapat disimpulkan perencanaan pembangunan desa adalah proses kegiatan masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintahan desa untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan, kapan waktunya, bagaimana melaksanakannya dan lain-lain, dimana hal tersebut bertujuan untuk memajukan masyarakat dan



mengubah desa menjadi lebih baik. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pada sebuah forum yang biasa disebut dengan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa).

5. Musrenbang Desa

Di dalam Musrenbang dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan jangka waktu enam tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dengan jangka waktu satu tahun. Hasil dari RPJM Desa dan RKP Desa akan dipakai sebagai acuan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dari Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa (Djohani, 2008:3) dijabarkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) desa untuk menyepakati rencana kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan Musrenbang Desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana lima tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.



Djohani (2008: 4-5) menjelaskan musrenbang desa adalah forum antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya

untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. dalam musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa. Pembangunan wajib melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi di dalam proses perencanaan pembangunan desa agar nantinya pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Program pembangunan desa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan pedoman program kerja pemerintah desa bersama lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat maupun pihak yang terkait.

Berikut program pemerintah desa bersama masyarakat Desa Arasoe yang didapat dari hasil kajian, hasil musyawarah serta hasil usulan. Kegiatan ini merupakan rencana pembangunan Desa Arasoe tahun 2016-2021 yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi Desa Arasoe.



idang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

-) Pemberian tunjangan kepada aparat pemerintahan

- 2) Pendataan desa
 - 3) Penetapan batas desa
 - 4) Penyusunan tata ruang desa
 - 5) Penyelenggaraan musyawarah desa
 - 6) Pengelolaan informasi desa
 - 7) Penyelenggaraan perencanaan desa dan musyawarah desa
 - 8) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - 9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor BPD
 - 10) Pengadaan mobiler kantor desa dan kantor BPD
 - 11) Kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, meliputi:
- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
 - 2) Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 - 3) Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
 - 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
 - 5) Pelestarian lingkungan hidup
- idang pembinaan kemasyarakatan, meliputi:
- 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan



- 2) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban,
 - 3) Pembinaan kerukunan umat beragama
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana seni dan olahraga
 - 5) Pembinaan lembaga adat
 - 6) Pembinaan kesenian, olahraga dan budaya sosial
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan
 - 2) Pelatihan teknologi tepat guna
 - 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pengusaha muda pemula dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa
 - 4) Peningkatan kapasitas masyarakat antara lain:
 - Kader pemberdayaan masyarakat desa
 - Kelompok usaha ekonomi kreatif dan industri rumah tangga
 - Kelompok pemuda
 - Kelompok perempuan
 - Kelompok tani dan ternak
 - Kelompok masyarakat miskin
 - Kelompok pengrajin
 - Kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan perempuan,



B. Tinjauan Empiris (Hasil Penelitian Terdahulu)

Tabel 1. Tinjauan empiris hasil penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Syarif Rasak (2019)	Partisipasi Pemuda Terhadap Program Desa Siaga Di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 21 orang. Informan utama dengan kriteria berusia 16-30 tahun. Informan kunci yakni kepala desa, petugas kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.	Dari tahap perencanaan pemuda mengikuti musyawarah desa, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan desa dan pemantauan & evaluasi setiap program. Adapun faktor pendukung, internal (motivasi diri), faktor eksternal (bantuan dana). Faktor penghambat, internal (malas dan kurang peduli) faktor eksternal (terbatasnya dana).	Sama-sama membahas partisipasi pemuda dalam pelaksanaan program Desa, dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program Desa.	Penelitian sekarang berlokasi di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian terdahulu partisipasi pemuda hanya fokus pada satu program desa. dan kalau penelitian sekarang yakni program desa yang sudah di rumuskan dalam hasil musrenbang Desa.
		Pemberdayaan Pemuda Dalam Program Pembangunan dan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Dengan	Menyadarkan pemuda bahwa mereka punya potensi dan peningkatan kapasitas. Faktor pendukung yakni kapasitas pendamping desa dan	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran	Penelitian sekarang membahas tentang partisipasi pemuda dalam implementasi program hasil



No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Peberdayaan masyarakat Desa (P3MD) di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone	metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini tidak dibatasi, hingga informasi yang dibutuhkan sudah mencukupi.	dukungan pemerintah. Faktor penghambat yakni kurangnya kesadaran pemuda, pemerintah belum mampu mengelola anggaran, aturan-aturan yang tidak berkesinambungan. Dampaknya belum besar, sesuai tolak ukur.	deskriptif. Dengan metode observasi, wawancara dan juga dokumentasi untuk mencari faktor dan dampak dari program pembangunan.	musrenbang desa, yang cakupannya seluruh program yang sudah ditetapkan dalam musrenbang. Kalau penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan pemuda dalam program pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.
3.	Agustin (2016)	M Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Di Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.	Pendekatan kualitatif yang dijabaran secara deskriptif. Dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yakni Aparat Desa serta warga Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.	Partisipasi dalam perencanaan diwujudkan kehadiran masyarakat dalam musyawarah. Partisipasi dalam pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, bahan (material). Partisipasi dalam kemanfaatan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan lingkungan. Partisipasi dalam evaluasi diwujudkan dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan untuk perbaikan Japordes.	Sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa	Penelitian terdahulu membahas partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian sekarang menghususkan pada partisipasi pemuda.



C. Kerangka Konsep

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

